



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : DEWAN DIREKSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUROSO ISNANDAR
2. Jabatan : DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO
3. NHK : 419195

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 11.870.000.000

1. Bangunan Seluas 32 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/180 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, WARISAN Rp. 215.000.000
3. Tanah Seluas 285 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 545.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 7.200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , WARISAN Rp. 1.310.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 1.950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 835.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOBIL, NISSAN SERENA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
210.000.000
3. MOBIL, SUBARU FORESTER Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
550.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---



D. SURAT BERHARGA	Rp.	154.300.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.567.833.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.600.000.000
Sub Total	Rp.	19.027.133.000
III. HUTANG	Rp.	2.220.210.869
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	16.806.922.131

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.